

Peningkatan Akses Pendidikan dalam rangka menghadapi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kab. Tanjab Timur Tahun 2008

Ade Rahima¹

Erlina Zahar

Abstract

This study menkaji about improving access to education and the implementation of the compulsory 9 years in the district. East Tanjab. Samples taken from two sub-district. In the district. East Tanjab. Ditentntukan school sample with random sampling technique. Results obtained dalah: 1) Achieving increased access to education at the primary level is much better than at the level of SMP / MTs. 2) Based on the indicators of GER, NER, school dropout (DO) and number of repeat classes, the district has not met the target East Tanjab reasonable thoroughness 9 years in an optimal fit mandated by the Presidential Instruction No. 5 / 2006 which is unable to maintain NER SD / MI of 95% and education GER SMP / MTs has not reached 95%. It can be concluded that unlicensed although aksess education in the district. East Tajab been no improvement but not yet ready to implement the Fair 12 years.

Keyword : Improvement, Education

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya serta mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang menjiwai nilai-nilai Pancasila (Depdiknas, 2007: 2)

Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintah Sejak Repelita I Tahun (1969-1974) sampai Sekarang. Tahun 2005, presiden mengeluarkan .Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan menegaskan bahwa pembangunan pendidikan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: 1) peningkatan dan penguatan akses pendidikan, 2) peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, serta 3) peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pengelola pendidikan.

Menyikapi hal tersebut, dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi Jambi tahun 2006 – 2010,

telah dinyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di provinsi Jambi. Dalam upaya untuk memajukan pendidikan, maka pemerintah juga telah melakukan berbagai program dan kegiatan. sesuai dengan Renstra Dinas pendidikan yang mengacu pada SK Gubernur Nomor 131 tahun 2001 bahwa tujuan yang harus dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam priode lima tahunan (2006–2010) adalah : 1) mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan dan pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK, unggul dan berstandar nasional/internasional, 3) meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan, unggul dan berdaya saing

Sedangkan Sasaran pembangunan pendidikan pada tahun 2008 secara lebih rinci adalah : 1) meningkatkan layanan pendidikan kepada anak usia dini, 2) menyusun perencanaan dan strategi pemenuhan hak warga negara akan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), 3) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan bagi penyelenggara pendidikan dan peserta didik, 4) meningkatkan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pencapaian standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan, 5) mengembangkan organisasi profesi sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan pendidikan yang bermutu, serta 6) meningkatkan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien (Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008)

Persoalan besar yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam pelayanan Wajar Dikmen 12 tahun adalah masalah pemerataan dan mutu, terutama pada pendidikan

¹ Dosen FKIP Universitas Batanghari

SLTA/MA. Dalam kaitannya dengan pemerataan akses pendidikan dan mutu, tantangan yang harus dihadapi tidaklah sedikit, antara lain adalah: pertama terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan wajar Dikmen 12 Tahun. Kurangnya guru untuk bidang studi tertentu, serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan bidang studi yang diajarnya (Depdikbud, 1998) merupakan hambatan bagi upaya peningkatan pemerataan pendidikan. Kedua, kondisi sosial ekonomi dan aspirasi orang tua untuk menyekolahkan anak yang amat terbatas, merupakan tantangan dan kendala yang juga tidak ringan (Latief, dkk. 1996: 259-270). Ketiga, perkembangan tingkat partisipasi anak usia 15-18 tahun pada pendidikan SLTA/MA masih belum menggembirakan dibandingkan dengan partisipasi anak usia 13-15 pada pendidikan SLTP.

Sementara itu di Kab. Tanjab Timur, hingga saat ini partisipasi anak usia 15-18 tahun pada pendidikan SLTA masih relatif rendah, yaitu baru mencapai 64,5%. Rendahnya partisipasi anak untuk mencapai jenjang pendidikan SLTA/MA akan terus bertambah, mengingat bahwa angka putus sekolah pada tingkat SLTA masih cukup tinggi. (Depdikbud, 1998). Kenyataan ini pun akan semakin diperburuk oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk mencermati masalah-masalah tersebut terkait pengkajian tentang peningkatan akses pendidikan di Kab. Tanjab Timur, perlu kajian yang komprehensif dan mendalam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimanakah peningkatan akses pendidikan dalam rangka menghadapipelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kab. Tanjab Timur tahun 2008? 2) Apakah Kab. Tanjab Timur sudah siap melaksanakan wajar 12 tagun pada tahun 2009?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan perumasan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan 1)bagaimanakah peningkatan akses pendidikan dalam rangka menghadapipelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kab. Tanjab Timur tahun 2008? 2) Apakah Kab. Tanjab Timur sudah siap melaksanakan

wajar 12 tagun pada tahun 2009?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu: 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi Depdiknas untuk perumusan kebijakan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. 2) Sebagai bahan masukan bagi Pemda khususnya Dinas Pendidikan provinsi dan kab. Tanjab Timur dalam pengevaluasian dan penyempurnaan berbagai persiapan penyelenggaraan Wajar Dikdas 12 tahun.

KAJIAN PUSTAKA

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun

Pelaksanaan program Wajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu; 1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, 2) tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, 3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, 4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 6 - 15 tahun. Pelaksanaan Wajar 9 Tahun dilakukan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Melalui jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Untuk tingkat SD diberlakukan pada SD regular, SD Kecil, SD Pamong, SD terpacu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan kelompok belajar Paket A. Sedangkan untuk tingkatan SLTP dilaksanakan SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka dan SLTP-LB dan kelompok belajar Paket B Ibrahim,1992:7)

Pada tahun 2000 adalah mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah., termasuk pengelolaan pendidikan (PP No.25 tahun 2000). Dengan kebijakan otonomi daerah ini terbuka kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secara menyeluruh, termasuk Wajar 9 tahun. Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing yang merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia. Ada keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu pihak ada daerah yang optimis, dan di pihak lain ada yang pesimis. Daerah yang merasa pesimis disebabkan oleh realitas kondisi daerahnya, khususnya kemampuan masyarakat untuk

menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda (Suyanto, 2001). Di samping itu muncul pula "kepanikan" bagi daerah dalam menyediakan dana alokasi umum (DAU) untuk menggaji guru dan pegawai yang didaerahkan. Di lain pihak, daerah yang optimis, yaitu daerah yang mampu membuat rencana anggaran untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya..

Sehubungan dengan itu, apapun sikap daerah segala kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Wajar 9 tahun ditangani secara otonom oleh daerah masing-masing. Diyakini atau tidak, pendidikan dasar 9 tahun merupakan wahana yang paling efektif untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya. Bagaimanapun berat dan sulitnya permasalahan yang ada pada awalnya, dengan adanya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan akan dapat dikelola dengan lebih murah dan lebih cepat. Desentralisasi pendidikan dapat mengembangkan kreativitas siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan manajemen berbasis sekolah (school based management) dengan tujuan agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Artinya, manajemen berbasis sekolah harus mampu melaksanakan perbaikan proses belajar-mengajar di kelas (classroom change) agar membuahkan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa (Zais, dalam Bendri, dkk. 2007:8).

Kemampuan pengelolaan di tingkat daerah Kab. yang lebih rendah sampai dengan tingkat satuan pendidikan, sangatlah menentukan. Dua dimensi yang paling esensial dalam kepemimpinan sebagai aspek pokok pengelolaan, adalah dimensi pelaksanaan tugas (task dimension) dan dimensi keterampilan membina hubungan (relation skill dimension) (Lunenburg & Ornstein dalam Bendri, dkk. 2008:8). Oleh karena itu, penciptan tenaga yang benar-benar berkemampuan merupakan keharusan (Webb & Norton, dalam Bendri, dkk. 2008:8). Hal ini tentulah tidak berarti unsur-unsur lain menjadi kurang penting, karena manajemen, dalam hal ini manajemen sekolah, adalah proses untuk menetapkan dan mencapai tujuan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen dengan memanfaatkan sumber-sumber manusia, uang (dana) atau materi (Plunket & Attner Bendri, dkk. 2008:8). Selanjutnya ditambah lagi dengan pemanfaatan mesin, waktu, dan teknologi (Barrack, Bendri, dkk. 2008:8)..

Pemerataan dan perluasan akses akan dilakukan dengan mengupayakan menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Berbagai kegiatan berikut akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan.

Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan diberikan dalam rangka membantu sekolah mencapai proses pembelajaran secara optimal. Bantuan pembiayaan tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta, madrasah maupun sekolah umum. Penyediaan perpustakaan, buku teks pelajaran maupun nonteks pelajaran yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta, sekolah umum dan madrasah. Target pada tahun 2009 diharapkan setiap siswa pada satuan pendidikan memperoleh buku teks pelajaran dan satuan pendidikan memperoleh buku nonteks pelajaran. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak, merupakan upaya melaksanakan penyediaan sarana penunjang pendidikan yang layak untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Target rehabilitasi pada tahun 2007 mencapai sekitar 200 ribu ruang kelas yang rusak berat dan 300 ribu ruang kelas yang rusak ringan pada SD; sekitar 9500 ruang kelas yang rusak berat dan lebih dari 23 ribu ruang kelas rusak ringan pada SMP.

Unit sekolah baru dan RKB. Penyediaan prasarana pendidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) diupayakan dalam rangka pemerataan dan perluasan di tingkat SMP/MTs, untuk menampung peningkatan jumlah lulusan SD/MI. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di tingkat SD dilakukan dengan memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada. (Diknas, 2008)

Perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap, merupakan langkah untuk mendirikan SD-SMP satu atap atau SMP Khusus, yaitu penambahan tingkat kelas (extended classes) untuk penyelenggaraan pendidikan menengah pertama pada setiap SD negeri yang ada di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang atau terpencil. Untuk itu akan dilakukan pemetaan sekolah agar program Dikdas satu atap dan SMP Terbuka dapat lebih optimal. Pada pendidikan luar biasa (PLB) upaya pemerataan dan perluasan akses dilakukan dengan pengembangan sekolah terpadu (SMP dan SMPLB) melalui pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan kelas layanan khusus di sekolah dasar, merupakan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang putus sekolah atau sama sekali belum pernah sekolah dasar sampai tamat. Layanan pendidikan dilaksanakan selama kurang satu tahun di luar kelas reguler pada sekolah dasar yang ada sebagai transisi untuk memasuki kelas reguler. Target pada tahun 2009 ialah setiap penduduk usia sekolah dasar memperoleh layanan Dikdas. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada tingkat SD dilaksanakan untuk mencapai target meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun dari 99,12% (2005) menjadi 99,57% pada tahun 2009. APM SD/Paket A/MI/SDLB diusahakan akan meningkat dari 94,3% (2005) menjadi 95,0% pada tahun 2009.

Indikator Pengukur Ketuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Wikipedia Indonesia, 29/7/2008). Berdasarkan jenjangnya pola pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi empat jenjang, antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Konsentrasikan negara-negara dunia dalam meningkatkan mutu kualitas manusia melalui jalur pendidikan adalah dengan menekankan pada pendidikan dasar untuk anak-anak usia sekolah dasar. Target tersebut sejalan dengan program pendidikan dasar di Indonesia yang dikenal dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (untuk anak usia 7-12 tahun) dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (untuk anak usia 13-15 tahun).

Untuk menilai tingkat keberhasilan setiap daerah di Indonesia dalam melaksanakan program wajar 9 tahun, dipergunakan suatu indikator atau ukuran, yang selama ini selalu dipergunakan dan telah dimasyarakatkan oleh badan dunia UNESCO (Suyono, 2000). Beberapa indikator tersebut antara lain: Pertama, menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) atau Net Enrolment Ratio pada tingkat Pendidikan Dasar. Angka partisipasi murni diperoleh dengan menjumlahkan seluruh anak usia sekolah dasar yang sedang sekolah dari suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Penjumlahan anak usia sekolah dari suatu daerah ini adalah dengan berbeda dengan angka partisipasi kasar yang biasanya termasuk anak-anak yang sedang sekolah tetapi berasal dari daerah lainnya. Itulah sebabnya sering terjadi bahwa suatu sekolah di perkotaan atau suatu sekolah di daerah yang dianggap bagus, mempunyai nilai partisipasi diatas 100 persen.

Kedua, menggunakan angka buta aksara suatu daerah yang diukur dari indikator buta aksara penduduk usia 15-24 tahun. Ukuran ini menjadi standar yang selama ini dikembangkan oleh UNESCO untuk mengukur indek kualitas penduduk atau human development index. Dengan adanya ukuran ini, setiap negara diharuskan melakukan upaya pemberantasan buta aksara bagi generasi muda agar anak muda dan remaja segera bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Ukuran ini sekaligus menjadi arahan dari upaya pemberantasan buta aksara yang dimasa lalu banyak dilakukan dengan arahan yang keliru, yaitu pemberantasan buta aksara tanpa memperhatikan usia sasaran yang digarap (dilakukan kepada penduduk diatas usia 50 tahun saja).

Ketiga, menggunakan proporsi murid di kelas 1 SD yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasarnya Sampai tamat SLTP/MTs. Dengan demikian, tidak ada drop-out atau anak yang tertinggal kelas. Oleh karena itu, ukuran ini mengharuskan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah agar tidak ada anak-anak yang drop-

out karena alasan apapun. Tidak ada anak yang tertinggal kelas karena kemiskinan atau tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga peranan sekolah, orang tua dan masyarakat sangat penting.

Keempat, perbedaan partisipasi pendidikan berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga pada semua jenjang pendidikan juga dapat dijadikan indikator. Berdasarkan hasil penelitian (Suryadi, 2008:4), menemukan fakta bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI, terdapat kesenjangan pendidikan antara kelompok perlimaan termiskin dan terkaya dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) relatif kecil. Pada kelas awal SD/MI (kelas 1-3), perbedaan tersebut tidak ada tapi pada kelas akhir perbedaan partisipasi pendidikan makin melebar meskipun tidak terlalu besar. Apabila diamati jenjang SLTP/MTs dan SLTA/MA perbedaan partisipasi makin melebar. Dalam perspektif gender, pada APS, APK dan APM 2005 dapat dikemukakan bahwa secara nasional tidak ada kesenjangan gender yang signifikan pada tingkat SD/MI. Kesenjangan gender dalam pendidikan justru terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa sampai 2004, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan pada tingkat SD/ MI dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Kondisi ini tercapai karena ada program wajar pendidikan dasar 6 tahun (wajar dikdas 6 tahun), sehingga ketersediaan pemerataan pendidikan relative tersebar merata di seluruh tanah air.

Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, secara nasional kesenjangan gender terjadi pada laki-laki yaitu sekitar 2-3%. Program wajar berdampak pada partisipasi perempuan terutama di pedesaan. Sedikitnya jumlah murid laki-laki dipedesaan disebabkan faktor pragmatis yaitu ekonomi keluarga: anak laki-laki harus segera bekerja untuk membantu memperoleh pendapatan keluarga, sedangkan anak perempuan tidak demikian.

Selanjutnya menurut Suryadi (2008:5) secara nasional, khususnya di pedesaan tidak terjadi kesenjangan gender yang signifikan pada jenjang SLTA/MA. Kesenjangan gender terhadap perempuan justru terjadi diwilayah perkotaan yaitu sekitar 2-3%. Hal ini terjadi karena pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang serta diyakini oleh kebanyakan masyarakat. Pada umumnya masyarakat beranggapan laki-laki adalah penopang ekonomi, oleh karena itu lebih penting diberikan kesempatan pendidikan yang setinggi-tingginya dibandingkan dengan perempuan yang dianggap lebih berperan dilingkungan keluarga. Kesenjangan pendidikan pada jenjang SLTP hingga perguruan tinggi terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yaitu sekitar 15-20% (Susenas, BPS 2004).). Selain itu, perbedaan partisipasi pendidikan tersebut disebabkan oleh faktor biaya, jarak tempuh rumah ke sekolah, serta pemahaman orang tua.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan pendidikan jenis survey kota dan termasuk kedalam

bentuk penelitian deskriptif-analitik. Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan menyajikan informasi untuk memberi landasan kebijakan. Kebijakan yang tepat harus disusun berdasarkan *informed decisions* atau *informed policy* yang relevan dan tepat., bukan atas dasar bisikan atau atau sekedar perkiraan yang belum dicek kebenarannya.

Duncan Mac Reac (dalam Wirda, Yandri dkk, 2006:11)) mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang mengutamakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta yang ada untuk menjelaskan, menilai dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Sedangkan William Dunn (1994) mengartikan analisis kebijakan lebih bersifat umum yaitu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendaya gunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan maslaah kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah bahwa analisis kebijakan tidak sekedar membuat ringkasan dari suatu keadaan atau kondisi. Analisis juga tidak hanya sekedar melakukan pengukuran tingkat akesuksesan progreem dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, analisis kebijakan hendaknya dapat memberi gambaran keadaan, mengadakan pengukuran tingkat kesuksesan program dan sekaligus melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan serta hambatan, peluang untuk perbaikan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang utamanya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Bappeda serta Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah dan Instansi lain yang terkait di seluruh Kabupaten dan Provinsi Jambi, Sekolah yang menjadi sampel penelitian.

Data Primer

Data primer diperoleh dari masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini. Data primer ini dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu:

Tabel 1. SAMPEL PENELITIAN

Provinsi	Sampel		
	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Sekolah
Jambi	Tanjung Timur	Muara Sabak	2 SD/MI
			2 SMP/MTS
			2 SMA/MA
		Mendahara	2 SD/MI
			2 SMP/MTS
			2 SMA/MA

Instrumen Penelitian

Alat untuk menumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket, pedoman

- Observasi (pengamatan) dan Wawancara yakni melihat langsung fakta-fakta yang ada dilokasi penelitian serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Fakta-fakta itu akan dicatat secara cermat dan sistematis oleh peneliti.
- kuesioner atau angket, yaitu berupa angket yang disampaikan kepada responden. Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat lokasi penelitian yang diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam angket terkait dengan bagaimana persepsi masyarakat terhadap program wajar 12 tahun di Provinsi Jambi.

Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang utamanya berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Bappeda serta Badan Pusat Statistik (BPS), laporan-laporan dari sekolah yang menjadi sampel penelitian. Selain itu, dokumen laian yang terkait juga diperoleh dengan membaca berbagai literatur, jurnal penelitian, makalah serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang di teliti.

Metode Penentuan Sampel

Dengan jumlah populasi sangat besar, maka perlu dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Multy Stage*, dengan cara 1) untuk menentukan daerah atau wilayah penelitian digunakan teknik areal sampling. Dengan pertimbangan daerah yang telah menerapkan wajar 9 tahun dan daerah yang tingkat pendidikannya reprenstatif terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Setelah ditemukan daerah (kabupaten) yang menjadi sampel selanjutnya ditentukan kecamatan di daerah tersebut. 3) Penentuan kecamatan didasarkan pada kecamatan yang tersedia tingkat pendidikanya dari SD/MI, SLTP/MTS dan SMA/MA, disamping itu kecamatan tersebut dapat merepresntasi dari kondisi kota dan ada yang merepresntasikan kondisi desa, sehingga setiap daerah yang terpilih akan dipilih 2 kecamatan yang mewakili kondisi tersebut. 3) Penentuan sekolah yang diambil sebagai sampel digunakan teknik *stratified random sampling*. Stratanya mengikuti sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

wawancara, dan dokumentasi.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian yakni untuk mendapatkan data skunder, namun melalui dokumen. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data skunder berupa data tertulis Data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Tanjab Timur, Bappeda serta Badan Pusat Statistik (BPS), dan Instansi lain yang terkait di seluruh Kabupaten, Sekolah yang menjadi

sampel penelitian. 2 Kecamatan yakni Kec. Muaro Sabak dan Mendarhara.

Panduan Wawancara

Untuk mendapat data tentang bagaimana peningkatan akses pendidikan di provinsi Jambi selain berdasarkan studi dokumentasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas kabupaten dan kecamatan. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan tentang kajian peningkatan akses pendidikan maka pedoman wawancara di fokuskan pada peningkatan akses dari aspek persamaan kesempatan atau disebut *equality* dan 2) aspek keadilan disebut juga *equity*.

Tabel 2. PANDUAN WAWANCARA

No	Variabel Peningkatan Akses Pendidikan	Hal-hal yang ditanya	Responden
1	a. Persamaan Kesempatan (<i>Equality</i>) b. Keadilan (<i>Equity</i>)	Karakteristik daerah: Lokasi dan infrastruktur, Geografis, sosbud dan ekonomi Profil Kecamatan: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk, Profil Pendidikan	Pejabat Dinas pendidikan
2	Persamaan Kesempatan (<i>Equality</i>) Keadilan (<i>Equity</i>)	Perluasan Akses Pendidikan	Tokoh Masyarakat Pejabat sekolah

Kuesioner atau angket

Kuesioner atau angket, yaitu berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden (Komite sekolah, masyarakat umum, pejabat sekolahguru) dalam penelitian ini . Sebelum diadministrasikan dilakukan uji coba instrument (khusus angket untuk masyarakat) untuk mengetahui realibilitas dan keterbacaannya dan diperoleh koefisien reabilitas instrument 0.8095. Jika dibandingkan koefisien reabilitas tersebut dengan koefisien reabilitas yang baik, yaitu antara 0,80-an dan 0,90-an (Hood & Johnson, 1991. Anasti & Urbina, 1997). Data yang telah terkumpul dari berbagai responden akan diolah dengan menggunakan teknik persentase (%) dan dinarasikan atau diolah secara kuantitatif dan kualitatif.

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis survei dan termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif-analitik. Deskriptif artinya menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi secara objektif, aktual dan rinci tentang gejala yang ada. 2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, 3) membuat perbandingan dan evaluasi, serta 4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu, metode deskriptif dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Data yang telah terkumpul dari berbagai responden akan diolah dengan menggunakan teknik persentase (%) dan dinarasikan atau dijelaskan secara kualitatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tiga kabupaten sampel tentang peningkatan akses dan persiapan wajar 12 tahun di Provinsi Jambi, maka hasil yang diperoleh mencakup Data tentang peningkatan akses pendidikan dalam persiapan wajar 12 tahun. Di Kab. Tanjab Timur.

Pembahasan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dibahas secara rinci yang terkait dengan masalah peningkatan akses dan persiapan wajar 12 tahun di Provinsi Jambi. Pembahasan tentang peningkatan akses pendidikan dimasing-masing kabupaten sampel, kondisi objektifnya terlihat dari data tingkat ketuntasan wajar 9 tahun yang telah dicapai oleh masing-masing kabupaten tersebut.

Peningkatan Akses pendidikan dalam Menghadapi Wajar 12 Tahun di Kab. Tanjab Timur

Tidak berbeda dengan kabupaten lain, bahwa tingkat pencapaian ketuntasan wajar 9 tahun yang telah dicapai Kab. Tanjab Timur berdasarkan indikator APK dan APM untuk jenjang pendidikan SD/MTs sudah mencapai target, namun pada jenjang SPM/MTs tidak berbeda dengan kabupaten lain yakni belum mencapai target 95% . Oleh karena itu, berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh kabupaten ini penekanannya juga masih pada peningkatan akses pendidikan wajar 9 tahun.

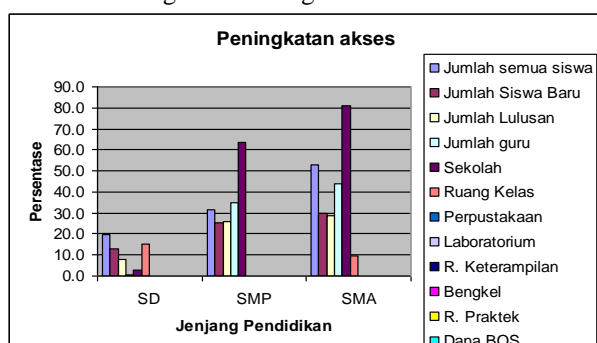
Kabupaten Tanjab Timur belum mencanangkan Program wajar 12 tahun. Peningkatan akses pendidikan dalam menghadapi wajar 12 tahun terlihat dalam program pendidikan menengah.

Tabel 14. Data Peningkatan Akses pendidikan dalam Menghadapi Wajar 12 Tahun di Kabupaten Tanjab Timur

No	Komponen	2007			2008		
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	Jumlah semua siswa	23556	6847	4516	28153	8993	6894
2	Jumlah Siswa Baru	4786	2688	1516	5394	3369	1972
3	Jumlah Lulusan	3356	1706	804	3623	2148	1034
4	Jumlah Guru	2203	647	748	2221	872	1077
5	Sekolah	223	47	21	229	77	38
6	Kelas	1164	239	130	1343	287	188
7	Ruang Kelas	1165	2094	137	1343	2094	150
8	Perpustakaan						
9	Laboratorium		46	14		46	14
10	R. Keterampilan			7			7
11	R. Multimedia						14

Sumber: Data pokok Pendidikan Kab. Tanjab Timur

Tabel di atas mengindikasikan bahwa beberapa komponen yang terkait dengan Peningkatan akses dalam menghadapi wajar 12 tahun di Kab. Tanjab Timur, tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari penambahan jumlah siswa yang terlayani pada jenjang SMA/SMK pada tahun 2007 ke 2008 tidak mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK persentasenya tidak menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 ke 2008. Selain itu, penambahan sarana dan prasarana pembelajar tidak terlihat (hampir tidak ada) khususnya untuk jenjang SMA/SMK. Bila kaitkan dengan persiapan wajar 12 tahun, hal ini sangat memprihatinkan karena tidak ada peningkatan akses pendidikan yang signifikan. Kecilnya peningkatan akses pendidikan yang dicapai oleh Kabupaten Tanjab Timur, menunjukkan belum adanya kesiapan dalam menghadapi wajar 12 tahun. Persentase pencapaian peningkatan akses dalam menghadapi wajar 12 tahun di kab. Tanjab Timur terangkum dalam gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Persentase peningkatan akses dalam persiapan wajar 12 tahun

Di Kab. Tanjab Timur.

Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan persentase yang sangat signifikan terlihat pada komponen jumlah sekolah SMA/SMK/MA naik mencapai 81% dari tahun 2007, begitu pula dengan jumlah sekolah SMP/MTs naik 63,8%. Penambahan jumlah sekolah merupakan upaya pemerintah Kab. Tanjab Timur untuk meningkatkan daya tampung pada jenjang sekolah menengah. Persentase peningkatan daya tampung pada jenjang SMA/SMK/MA mencapai 52,8%, sedangkan SMP/MTs 31,3%. Selanjutnya peningkatan jumlah siswa akan lebih jelas terlihat dari peningkatan jumlah siswa baru tingkat SMA/ SMA/SMK/MA 30,2%, dan tingkat SMP/MTs 25,3%. Peningkatan jumlah siswa harus dapat diiringi dengan peningkatan jumlah guru. Peningkatan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA meningkat 44,2% dan untuk SMP/MTs 34,8%. Selain itu, untuk peningkatan daya tampung, pemerintah juga harus memperhartikan mutu dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Namun dalam hal ini belum dapat dilaksanakan pemerintah Tanjab Timur. Hal ini diindikasikan oleh minimnya sarana dan prasarana pembelajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktek lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan indikator APK, APM, angka putus sekolah (DO) dan angka mengulang kelas, maka kabupaten Tanjab Timur belum memenuhi target ketuntasan wajar 9 tahun secara optimal sesuai yang diamanatkan oleh Inpres No. 5 Tahun 2006 yakni mempertahankan APM SD/MI 95% dan APK jenjang pendidikan SMP/MTs telah mencapai 95 %. Kab. Bungo dan Tanjab Timur telah berhasil mencapai APM SD/MI di atas 95% sedangkan Kab. Kerinci baru 94,48 % (belum tuntas).
 2. Pencapaian peningkatan akses pendidikan pada tingkat SD/MI jauh lebih baik dibandingkan pada tingkat SMP/MTs. Hal tersebut diindikasikan oleh tingginya APK dan APM pada tingkat SD/MI yang telah mencapai angka 100% atau pada kisaran 99,47 sampai 115,9% dengan APM berada pada kisaran 94,48 %. Sampai 98,90%. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Kab. Tanjab Timur dalam mencapai target ketuntasan wajar 9 tahun antara lain; memberi subsidi biaya pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.
 3. Kebijakan daerah yang terkait dengan peningkatan akses pendidikan dalam menghadapi wajar 12 tahun belum terlihat dengan jelas dalam Renstra Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur. Hal ini, disebabkan oleh sasaran kebijakan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten untuk tahun 2009 masih difokuskan pada pencapaian target ketuntasan wajar 9 tahun. Artinya ada kabupaten ini belum merencanakan kapan dimulainya pelaksanaan wajar 12 tahun dimasing-masing kabupaten.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Anastasi, A. & Urbina, S 1997 . *Psychological Testing*. Upper Saddale River, New Jersey: Prenti-Hall International, Inc.
- Balitbang Depdiknas, 2003. *Selintas Pendidikan Indonesia di awal Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Bendri, Alwen.dkk. 2007:8 *Efektifitas Pelaksanaan Wajub Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat*. Padang :Universitas Negeri Padang.
- Boediono, Jiyono, Indriyanto, B., dan Swaryani, N. 1999. "Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Pendidikan Dasar". *Ringkasan Eksekutif Hasil Studi* (Volume 1).
- Depdikbud 1997. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Setjen Depdikbud, Jakarta
- Depdiknas RI, 2004. *Buku Kebijakan Direktorat PLP*, Depdiknas, Jakarta.
- Depdiknas RI, 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional*, Pusat Informasi dan Humas, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas RI, 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar*.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2004. *Profil Pendidikan Provinsi Jambi 2003-2004*, Jambi
- Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2004. *Pendataan Pendidikan 2005/2006*, Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008, *Laporan Akuntabilitas Tahun 2008 Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Penyusunan*
- Gubernur Jambi. 2008. *Nota Pengantar LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2008*. Jambi.
- Hassanuddin, B. 2000. "Diundur Hingga 2009, Penuntasan Wajar 9 Tahun", *Harian Kompas*, Edisi 3 Maret.
- Ibrahim, R. 1992. "Penyelenggaraan Pendidikan Dasar", *Mimbar Pendidikan* No. 1 tahun XI April 1992. Bandung: University Press IKIP Bandung
- Latief, Abdul. dkk 1996. "Berbagai kendala dalam Penyelenggaraan Wajar 9 Tahun", *The Journal of Educational Reasearch*, 1998 (5), 259-270)
- Nurhadi, M.A. 2000. "Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Bisa Dimajukan". *Harian Kompas*. Edisi 10 Maret.
- Mayer, R.R & Greenwood, E .1998. (terj). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta :Pustekom Dikbud & C.V. Rajawali.
- Prayitno. 2000. *Hak dan Kewajiban Pendidikan* . Padang: Jurusan Bimbingan Konseling FIP UNP.
- Dinas Pendidikan Kab. Kerinci. 2008. *Profil Pendidikan Kabupaten Kerinci*.
- Dinas Pendidikan Kab. Bungo. 2008. *Profil Pendidikan Kabupaten Bungo..*
- Syarif, Hidayat. 1994. "Wajib Belajar 9 tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Memajukan desa Tertinggal". Makalah: IKIP Bandung.

- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi, Dedi 2008. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan Bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Ace. 2003. “ Kependudukan dan Pembangunan”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ke-14, No.070, Januari 2008. ISSN-0215-2673*. Jakarta: Balitbang Depdiknas
- Suryadi, Ace. 2008 “Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal”. Makalah Semiloka Nasional PAUD di Universitas Negeri Semarang, 4 Desember 2008.
- Suyanto, 2001. *Rencana Operasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 3002-2005*. Lembaga Penelitian Udayana. Kupang.
- Depsos, 2004. *Susenas, BPS 2004*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Tahun 2003.
- Wirda, Yandri dkk, 2006. *Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan (Seri Analisis Kebijakan Pendidikan)*. Jakarta: Pulitjaknov, Balitbang Depdiknas.
- Wikipedia Indonesia, 29/7/2008